

PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM MEMPERKUAT DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh

Bilqis Dewi P, Yasmine Erlisa W, Cherisanda Nesya N, Kuswan Hadji, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar e-mail: bilqis.dewi.purnomo@students.untidar.ac.id,
cherisanda.nesya.nareswari@students.untidar.ac.id,
yasmine.erlisa.maharani.wibowo@students.untidar.ac.id
kuswanhadji@untidar.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum sesuai konstitusionalisme menegaskan komitmen ini sejak UUD 1945 ditetapkan yang kemudian menjadi cita-cita bersama atau falsafah kenegaraan. Demokrasi dan negara hukum saling terkait dengan demokrasi mencakup prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum mengandung prinsip hukum. Hukum memiliki makna yang dinamis sesuai dengan norma yang berlaku dan tetap memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia di berbagai tingkat, mulai dari keluarga hingga tatanan negara. Salah satu peran utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum harus melindungi hak warga negara dengan prinsip kemanusiaan dan menghormati hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada hukum mengamatkan bahwa semua warga dan pemerintah harus patuh pada hukum. Namun, realitanya sering kali aturan hukum dilanggar, bahkan oleh pihak yang seharusnya menegakkannya. Sistem hukum perlu diperbaiki secara menyeluruh, meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum, dengan mengadopsi prinsip negara hukum demokratis yang lebih holistik dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi peran lembaga negara dalam mengatasi kompleksitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum. Dalam analisis penegakan hukum di Indonesia, peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat, terutama terkait dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan aplikasinya dalam penegakan hukum dianggap sangat penting.

Kata kunci: UUD 1945, demokratis, penegakan hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara historis, lembaga negara telah berkembang dari sistem monarki absolut ke sistem demokrasi modern, di mana lembaga- lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Peran lembaga negara didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi dan aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warganya serta antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Selain

itu, faktor- faktor seperti perkembangan ekonomi, sosiaal budaya, dan politik juga memengaruhi peran lembaga negara dalam menjalankan fungsinya untuk menciptakan stabilitas, kesejahteraan, dan keadilan dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dapat ditelusuri dari proses sejarahnya. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945 Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara yang mencakup prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana semua warga memiliki kesempatan yang

sama dalam membuat keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka, baik melalui partisipasi langsung maupun perwakilan. Hal ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung kebebasan politik dan penghargaan terhadap martabat manusia. Pembentukan Undang- Undang Dasar 1945 yang kemudian disempurnakan melalui amendemen menegaskan komitmen negara terhadap supremasi hukum.

Hukum memiliki sifat yang fleksibel sesuai dengan situasi dan penelitian yang dilakukan. Meskipun demikian, peran hukum sangat penting dalam kehidupan manusia di semua tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, hukum juga berperan dalam mengubah struktur dan budaya masyarakat serta sebagai alat pengendalian sosial dan rekayasa sosial. Perubahan dan implementasi hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk historis, sosial, politik, ekonomi, budaya, pemerintahan, faktor global, serta kemajuan teknologi dan informasi. Pendekatan seperti hukum responsif, progresif, dan restorative justice dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan hukum untuk mencapai keadilan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Lembaga negara yang ada memiliki tujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara guna mencapai tujuan-tujuan negara. Lembaga negara independen dibentuk karena tugas- tugas kenegaraan semakin kompleks, memerlukan independensi operasional, serta mendorong upaya pemberdayaan lembaga negara yang sudah ada dengan membentuk lembaga baru yang lebih spesifik. Lembaga negara merupakan pilar utama dalam struktur pemerintahan suatu negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan berbagai fungsi kenegaraan. Sebagai bagian integral dari

sistem pemerintahan, lembaga negara memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan- tujuan negara. Melalui organisasi dan mekanisme yang telah ditetapkan, lembaga negara menjadi sarana yang vital dalam menjaga stabilitas, melaksanakan kebijakan publik, serta memastikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks demokrasi modern, lembaga negara juga menjadi penjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, seperti lembaga peradilan dan legislatif. Kehadiran lembaga negara yang independen dan berfungsi efektif menjadi landasan bagi terciptanya good governance serta pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Maka dari itu kami memilih judul "Peran Lembaga Negara Dalam Memperkuat Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran lembaga negara dalam mengatasi permasalahan demokrasi dan penegakan hukum yang masih kompleks di Indonesia?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi lembaga negara dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis peran Lembaga negara dalam mengatasi permasalahan demokrasi dan penegakan hukum yang masih kompleks di Indonesia.
2. Menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi Lembaga negara dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia

D. Tinjauan Pustaka

Kusnadi (2023) dalam tulisannya "Tantangan Terkini dalam Sistem Hukum Indonesia" menganalisis berbagai tantangan

yang dihadapi oleh sistem hukum di Indonesia saat ini. Salah satu tantangan yang negara independen yang muncul setelah amandemen UUD 1945.¹

Lestari, et al. (2023) dalam penelitiannya "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital" juga menyoroti tantangan yang dihadapi negara hukum Indonesia dalam menegakkan hukum tata negara di era digital. Salah satu tantangan yang dibahas adalah kesulitan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.²

Rumadan (2017) dalam artikelnya "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian" menekankan pentingnya peran lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan dan perdamaian. Ia menyoroti pentingnya independensi lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.³

Sanyoto (2008) dalam penelitiannya "Penegakan hukum di Indonesia" menganalisis berbagai aspek penegakan hukum di Indonesia. Ia menyoroti pentingnya budaya hukum yang kuat dalam masyarakat dan peran lembaga-lembaga negara dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten.⁴

Widayati (2022) dalam tulisannya "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis" membahas keterkaitan antara penegakan hukum, negara hukum, dan demokrasi di Indonesia. Ia

disoroti adalah tumpang tindih kewenangan dan konflik antara lembaga-lembaga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.⁵

Dari tinjauan pustaka tersebut, terlihat bahwa para peneliti dan penulis menganalisis berbagai aspek terkait peran lembaga negara dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Mereka menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti tumpang tindih kewenangan, perkembangan teknologi, serta pentingnya budaya hukum dan independensi lembaga penegak hukum. Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini memberikan perspektif yang komprehensif tentang topik yang dibahas dalam dokumen yang diberikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan normatif. Metode berpikir induktif digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan memulai dari hal-hal spesifik menuju kesimpulan umum, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Peran Lembaga Negara dalam Mengatasi Permasalahan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang Masih Kompleks Di Indonesia?**

Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.

⁴ Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204

⁵ Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 19-31.

¹ Kusnadi, A. H. (2023). Tantangan Terkini dalam Sistem Hukum Indonesia. *Tugas Mahasiswa Hukum*, 1(1)

² Lestari, S. A., Sadida, M. R., Maharani, R. P., & Andini, I. W. (2023). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 29-43.

³ Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi

Peran lembaga negara dalam mengatasi permasalahan demokrasi dan penegakan sangatlah penting dan kompleks. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tanggung jawab yang beragam untuk memperkuat fondasi demokrasi dan menegakkan keadilan hukum di negara ini. Lembaga Legislatif, terdiri dari DPR dan DPD, memiliki peran kunci dalam menciptakan undang-undang yang mendukung demokrasi dan penegakan hukum. Mereka harus aktif dalam merancang undang-undang yang transparan, akuntabel, dan melindungi hak-hak masyarakat. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan penyusunan anggaran yang mendukung lembaga penegak hukum juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Lembaga Eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden dan Kabinetnya, bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan kebijakan publik yang mendukung demokrasi dan penegakan hukum. Mereka harus memastikan bahwa aparat penegak hukum diperkuat secara profesional dan independen, serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil tanpa diskriminasi. Lembaga Yudikatif, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Peradilan Agama, memiliki peran penting dalam mengawasi demokrasi dan penegakan hukum. Mereka harus menjaga keadilan, kepastian hukum, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga yang berfokus pada interpretasi dan pengujian konstitusi, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar hak-hak warga. Dalam konteks demokrasi, MK harus memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak menyalahi aturan hukum. Selain lembaga-lembaga negara tersebut, peran lembaga peradilan juga sangat penting dalam

hukum di Indonesia

mengatasi permasalahan demokrasi dan penegakan hukum. Lembaga peradilan harus memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim-hakim sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak warga. Dalam konteks demokrasi, lembaga peradilan harus memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak menyalahi aturan hukum.

Lembaga-lembaga Independen, seperti KPU, Bawaslu, dan KPK, memiliki tugas khusus dalam menyelenggarakan pemilu yang adil, memantau penyelenggaraannya, dan memberantas korupsi secara tegas dan efektif. Selain lembaga negara, peran penting juga dimiliki oleh masyarakat sipil. Mereka dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah, membangun budaya demokrasi, dan melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Dalam sintesis, peran lembaga negara dalam mengatasi permasalahan demokrasi dan penegakan hukum yang masih kompleks di Indonesia sangat penting. Lembaga-lembaga negara seperti Kepolisian, KPK, MK, dan lembaga peradilan harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga yang berfokus pada korupsi, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan korupsi tidak terjadi dan jika terjadi, maka KPK dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mengambil tindakan hukum yang sesuai. Dalam konteks demokrasi, KPK harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak menyalahi aturan hukum. Dengan demikian Indonesia dapat meningkatkan keberlangsungan demokrasi dan penegakan hukum yang efektif dan transparan. Peran lembaga negara dalam mengatasi permasalahan demokrasi

dan penegakan hukum di Indonesia adalah kunci utama untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih cerah. Dengan keterlibatan aktif dan optimal dari lembaga-lembaga tersebut, kita dapat optimis bahwa demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia akan terus berkembang dan semakin kuat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk bersama-sama mendukung dan mengawasi kinerja lembaga negara agar dapat menjalankan perannya secara maksimal. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat sipil, kita dapat memastikan bahwa fondasi demokrasi dan keadilan hukum terus diperkuat, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih demokratis dan bermartabat.

2. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Lembaga Negara Dalam Memperkuat Demokrasi dan Penegakan Hukum Di Indonesia.

Sejak dimulainya era reformasi, gagasan demokrasi semakin populer. Hal ini terlihat dari kebebasan pers untuk memberitakan kebijakan pemerintah dan hak masyarakat atas kebebasan berpendapat. Abdurrahman Wahid, presiden keempat Republik Indonesia, mencabut larangan ekspresi budaya Tionghoa, menunjukkan dukungan berkelanjutan negara terhadap demokrasi Pancasila.

Namun, era reformasi juga menghadirkan teka-teki bagi negara ini. Salah satunya adalah, atas nama mayoritas, kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan untuk menegaskan identitas kelompok tertentu. Wajar saja hal ini menjadi permasalahan negara dan berpotensi menggerogoti landasan Demokrasi Pancasila. Misalnya saja, banyak perselisihan di masyarakat yang bersumber dari perbedaan agama dan budaya, ujaran kebencian yang menysar kelompok minoritas semakin meningkat, ide-ide yang mendorong intoleransi semakin menyebar, dan serangan teroris semakin sering terjadi.

Keadaan demokrasi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan supremasi hukum, juga sangat memprihatinkan di tingkat politik dan pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah banyaknya kasus pelanggaran HAM, tidak adanya masukan masyarakat dalam penyusunan berbagai undang-undang seperti RKUHP, Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU ITE yang menyulitkan pembela HAM, banyaknya putusan Perpu yang tidak didukung oleh kajian yang tidak memihak, dan masih banyak lagi. Hal ini cukup ironis karena kedaulatan dipegang oleh rakyat, dan partisipasi rakyat sangat penting dalam demokrasi. Masyarakat Indonesia mudah terprovokasi oleh kekhawatiran SARA di tingkat sosial. Hal ini menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat, padahal hal tersebut merupakan salah satu komponen demokrasi yang paling krusial. Partai-partai politik dan parlemen kini secara institusional merupakan pelanggar supremasi hukum, bukan pembela supremasi hukum. Selain itu, sejumlah permasalahan penting, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan radikalisme agama, tidak penting bagi otoritas nasional. Belum ada pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat dalam menegakkan demokrasi. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlalu kuat.

Lembaga-lembaga negara di Indonesia menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan dalam upaya mereka menegakkan demokrasi dan menerapkan hukum. Diantaranya adalah:

1. Kurangnya Pengetahuan dan Literasi Politik: Penting untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang sifat dan prinsip demokrasi. Agar kebebasan beradab dan bertanggung jawab, negara melalui sektor pendidikan dan media massa harus menyediakan pendidikan politik dan demokrasi yang berkualitas.
2. Konflik yang Berakar pada Perbedaan Agama dan Budaya: Perbedaan agama

- dan budaya dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat serta permusuhan dan kerusuhan sosial politik.
3. Penggunaan Kekuasaan Pribadi: Para pejabat Indonesia sering kali menjalankan negara dengan bertentangan dengan konstitusi dan sesuai dengan preferensi mereka sendiri, sehingga mengancam stabilitas demokrasi.
 4. Kurangnya Pengembangan Budaya Hukum: Karena Indonesia belum membangun budaya hukum, opini bisa saja disalahgunakan dan berujung pada keresahan sosial.
 5. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Praktik-praktik ini, jika dilakukan oleh elit atau kelompok kepentingan tertentu, berpotensi melemahkan supremasi hukum dan menimbulkan keraguan terhadap demokrasi secara keseluruhan.
 6. Kurangnya kemampuan dan sumber daya aparat penegak hukum: Investigasi dan penuntutan korupsi mungkin terhambat karena kurangnya kemampuan dan sumber daya aparat penegak hukum.
 7. Kesulitan Teknologi: Seiring kemajuan teknologi, penegakan hukum mungkin menghadapi kesulitan baru terkait keamanan data, privasi, dan regulasi teknologi.
 8. Tidak adanya pengawasan dan pengendalian: Keberadaan demokrasi itu sendiri mungkin dipertanyakan karena tidak adanya pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
 9. Pertumbuhan Sistem Peradilan yang Tidak Memadai: Pertumbuhan sistem peradilan yang tidak memadai berpotensi mengganggu penyelenggaraan peradilan dan menimbulkan keraguan terhadap keberadaan demokrasi yang sejati.
 10. Tidak Adanya Pengembangan

Kepemimpinan: Stabilitas demokrasi dapat terganggu dan keberadaan demokrasi itu sendiri dipertanyakan karena kurangnya pengembangan kepemimpinan yang jujur dan adil.

Dengan demikian, lembaga negara di Indonesia harus berupaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini dengan cara meningkatkan literasi politik, mengembangkan budaya hukum, meningkatkan sumber daya dan kapasitas lembaga penegak hukum, serta mengembangkan sistem peradilan yang lebih efektif dan adil. Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik ataupun hasil studi lapangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan menjawab rumusan masalah dari permasalahan yang diteliti.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Peran lembaga negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan independen, bersama dengan partisipasi masyarakat sipil, sangat penting dalam mengatasi permasalahan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk lembaga peradilan dan lembaga independen seperti KPK, serta pemantauan dan dukungan dari masyarakat sipil, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasi dan meningkatkan penegakan hukum.

B. Saran

Setelah amandemen UUD 1945, lembaga negara muncul dengan cepat, menyebabkan tumpang tindih dan konflik antara lembaga-lembaga independen. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan langkah-langkah seperti memperkuat lembaga-lembaga tersebut melalui konstitusi, memastikan adanya dasar hukum yang kuat, dan mengurangi kewenangan DPR dalam

menunjuk pimpinan lembaga independen.

Penguatan tersebut dianggap penting untuk mencapai tujuan negara melalui lembaga- lembaga independen tersebut. Selain itu, pembubaran lembaga negara yang tidak lagi relevan juga penting karena jumlah lembaga yang berlebihan dapat memperpanjang rantai birokrasi, menyebabkan tumpang tindih dalam kebijakan, dan mengurangi efektivitas serta efisiensi

DAFTAR PUSTAKA

- Kusnadi, A. H. (2023). Tantangan Terkini dalam Sistem Hukum Indonesia. *Tugas Mahasiswa Hukum, 1*(1).
- Lestari, Savina Anggun, Muhammad Rijal Sadida, Risyan Putri Maharani, and Intan Wahyuningtyas Andini. "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital." *Jurnal Relasi Publik 1*, no. 2 (2023): 29–43.
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6*(1), 69-87
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum, 8*(3), 199-204.
- Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan), 1*(1), 19-31

